



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://klipping.dpr.go.id>

**Judul** : Waspada Siasat Menunda Rapat Paripurna  
**Tanggal** : Jumat, 23 Agustus 2024  
**Surat Kabar** : Pikiran Rakyat  
**Halaman** : 1&10

## Waspada Siasat Menunda Rapat Paripurna

JAKARTA, (PR).-

Buntut dari aksi demonstrasi massa yang meluas dan rusuh, DPR memastikan, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada batal dilaksanakan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun akan dibatalkan untuk Pilkada 2024. Namun, publik justru khawatir agar waspada siasat DPR yang menunda rapat paripurna sambil menunggu situasi protes mereda.

Dalam keterangannya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, pada saat pendirian calon kepala daerah untuk pilkada pada 27 Agustus 2024, bakal menerapkan putusan dari MK. "Yang akan berlaku adalah keputusan MK (*judicial review*) MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,"

kata Dasco dalam akun resmi media sosial X yang diunggah pada Kamis (22/8/2024) petang.

RUU Pilkada memang pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya, pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan putusan MK pada Selasa (20/8/2024) tentang syarat pencalonan pada pilkada. Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dengan agenda pengesahan RUU Pilkada yang rencananya digelar pada Kamis pagi ini, batal digelar dan dijadwal ulang. Keputusan diambil lantaran jumlah peserta rapat tidak memenuhi quorum. Jumlah peserta rapat tidak mencapai quorum setelah hanya dihadiri oleh 86 dari total 575 anggota

DPR RI.

Sufmi Dasco Ahmad menjamin, tidak akan ada agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada secara diam-diam setelah batal disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis pagi. Dia mengatakan bahwa sesuai dengan aturan tata tertib, rapat paripurna hanya bisa digelar pada hari Selasa atau Kamis. Dengan demikian, tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada hingga pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada pada 27 Agustus 2024.

"Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi, harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR," kata Dasco saat konferensi pers di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta,

kemarin malam.

Menurut Dasco, rapat-rapat yang digelar di DPR itu bersifat terbuka dan ditayangkan langsung di kanal media sosial DPR. Begitu pula dengan rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang membahas RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024), pun terbuka dan bisa disaksikan masyarakat.

"Karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil putusan Mahkamah Konstitusi, *judicial review* yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora," kata dia.

Sufmi berdalih bahwa RUU Pilkada ini tidak ujug-ujug bergulir di DPR. Pasalnya, proses legislasi terhadap RUU tersebut sudah dilakukan

(Bersambung ke hal. 10 kol. 1)

## Waspada Siasat

(Sambungan dari hal. 1 kol. 5)

sejak Januari 2024, tetapi secara perlahan.

Walaupun begitu, dia mengatakan bahwa RUU Pilkada pun berpotensi akan tetap dibahas setelah tahapan-tahapan Pilkada 2024 selesai. Soalnya, DPR pun menilai bahwa mekanisme dalam proses pilkada atau pemilu perlu disempurnakan.

### Segelintir elite

Koordinator Komite Pemilihan Indonesia, Jeirry Samudrawong, mengatakan, penundaan rapat paripurna DPR me-

menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPR memang tak setuju dengan keputusan Baleg. Itu untuk melakukan revisi UU Pilkada sesuai selera para elite partai dan pemerintah. "Ini juga menunjukkan bahwa keinginan melakukan revisi mendesak tersebut hanya merupakan keinginan segelintir elite yang peripat yang tak mau taat dan patuh terhadap konstitusi," katanya.

Jeirry khawatir-watni agar waspada siasat DPR yang menunda rapat paripurna

sambil menunggu situasi protes mereda.

"Bisa saja malam nanti paripurna tetap dilakukan jika para pimpinan partai me-

maksda dan mengancam para anggota dewan mereka untuk menghadiri paripurna. Se-  
bagaimana, menurut informasi yang beredar, para anggota DPR tetap diperintahkan oleh pimpinan partai koalisi partai untuk tetap berada di sekitar kantor DPR agar bisa sewaktu-waktu diperintahkan oleh DPR, elite partai dan pemerintah, untuk melakukan pembangkangan secara lebih luas dan masih. Jadi *civil disobedience* akan makin meluas," katanya.

Jeirry mengatakan, tindakan Baleg DPR sudah cetak prosedur dan cacat substansi

yang dilakukan dalam prosesnya, mendadak dan tak mengikut prosedur yang berlaku. Langkah Baleg DPR juga cacat substansi. Soalnya, draf yang disusun bertentangan dengan substansi Putusan MK No. 60 dan 70.

"Jadi, secara substansial, ini pembangkangan terhadap konstitusi. DPR sebagai lembaga tinggi negara sudah tak taat dan patuh konstitusi," katanya. Sementara itu, Kepala

Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nashi mengatakan, pemerintah terkait UU Pilkada. Apalagi, DPR RI sudah menyatakan tidak ada pengesahan RUU Pilkada.

"Pemerintah dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan mengikuti aturan yang berlaku saat ini," kata Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Hasan menyampaikan bahwa apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU Pilkada tidak disahkan, DPR akan mengikuti aturan ter-akhir, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi.

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hasan memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan memainkan peran dalam proses berdemokrasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya di ranah yudikatif. DPR menjalankan perannya di wilayah pembentukan undang-undang, sementara media dan masyarakat sipil juga menjalankan peran sebagai aktor demokrasi.

"Di tengah tarik-menarik

dan perbedaan pendapat, kita melihat kebesaran kita sebagai sebuah bangsa," ujarnya.

Pemerintah berharap tidak ada disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekecewaan. "Kita harus tetap harus menjaga situasi kondusif agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu," kata Hasan.

### Tak kuorum

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi tidak menampik kuorum rapat paripurna tidak terpenuhi karena adanya aspirasi yang diterima para legislator untuk tidak menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada. Namun, ia menyebut, aspirasi itu sifatnya beragam.

Meski tidak menampik adanya aspirasi tersebut, ia menekankan bahwa Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada itu ditunda karena peserta rapat yang hadir tidak memenuhi kuorum. "Tidak kuorum itu karena misalkan telepon istrinya suruh jangan berangkat, ditelepon masyarakatnya suruh jangan berangkat, kan aspirasi juga, aspirasi bukan?" katanya.

Bahkan, ada pula beberapa anggota DPR yang ikut mengunggah gambar "Peringatan Darurat", sebagaimana yang ramai diunggah warganet di media sosial.

"Di konstitusi dilarang untuk hadir di paripurna, bahkan ada anggota DPR yang ikut pasang-pasang begitu (Peringatan Darurat), itu kan aspirasi dari publik," ucapnya.

Menurut dia, aspirasi untuk tidak melanjutkan RUU Pilkada ke rapat paripurna juga seperti yang disampaikan massa aksi yang menggelar demonstrasi di Gedung DPR RI yang sempat ditemuinya.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agas mengatakan institusinya masih menunggu langkah DPR mengenai keputusan melanjutkan Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada.

"Prinsipnya, pemerintah sifatnya pasif dan menunggu keputusan dari parlemen, apakah revisi UU (Pilkada)

dan perbedaan pendapat, kita melihat kebesaran kita sebagai sebuah bangsa," ujarnya.

Pemerintah berharap tidak ada disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekecewaan. "Kita harus tetap harus menjaga situasi kondusif agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu," kata Hasan.

### Tak kuorum

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi tidak menampik kuorum rapat paripurna tidak terpenuhi karena adanya aspirasi yang diterima para legislator untuk tidak menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada. Namun, ia menyebut, aspirasi itu sifatnya beragam.

Meski tidak menampik adanya aspirasi tersebut, ia menekankan bahwa Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada itu ditunda karena peserta rapat yang hadir tidak memenuhi kuorum. "Tidak kuorum itu karena misalkan telepon istrinya suruh jangan berangkat, ditelepon masyarakatnya suruh jangan berangkat, kan aspirasi juga, aspirasi bukan?" katanya.

Bahkan, ada pula beberapa anggota DPR yang ikut mengunggah gambar "Peringatan Darurat", sebagaimana yang ramai diunggah warganet di media sosial.

"Di konstitusi dilarang untuk hadir di paripurna, bahkan ada anggota DPR yang ikut pasang-pasang begitu (Peringatan Darurat), itu kan aspirasi dari publik," ucapnya.

Menurut dia, aspirasi untuk tidak melanjutkan RUU Pilkada ke rapat paripurna juga seperti yang disampaikan massa aksi yang menggelar demonstrasi di Gedung DPR RI yang sempat ditemuinya.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agas mengatakan institusinya masih menunggu langkah DPR mengenai keputusan melanjutkan Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada.

"Prinsipnya, pemerintah sifatnya pasif dan menunggu keputusan dari parlemen, apakah revisi UU (Pilkada)

dan perbedaan pendapat, kita melihat kebesaran kita sebagai sebuah bangsa," ujarnya.

Pemerintah berharap tidak ada disinformasi atau fitnah yang bisa memicu keributan dan kekecewaan. "Kita harus tetap harus menjaga situasi kondusif agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu," kata Hasan.

### Tak kuorum

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi tidak menampik kuorum rapat paripurna tidak terpenuhi karena adanya aspirasi yang diterima para legislator untuk tidak menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada. Namun, ia menyebut, aspirasi itu sifatnya beragam.

Meski tidak menampik adanya aspirasi tersebut, ia menekankan bahwa Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada itu ditunda karena peserta rapat yang hadir tidak memenuhi kuorum. "Tidak kuorum itu karena misalkan telepon istrinya suruh jangan berangkat, ditelepon masyarakatnya suruh jangan berangkat, kan aspirasi juga, aspirasi bukan?" katanya.

Bahkan, ada pula beberapa anggota DPR yang ikut mengunggah gambar "Peringatan Darurat", sebagaimana yang ramai diunggah warganet di media sosial.

"Di konstitusi dilarang untuk hadir di paripurna, bahkan ada anggota DPR yang ikut pasang-pasang begitu (Peringatan Darurat), itu kan aspirasi dari publik," ucapnya.

Menurut dia, aspirasi untuk tidak melanjutkan RUU Pilkada ke rapat paripurna juga seperti yang disampaikan massa aksi yang menggelar demonstrasi di Gedung DPR RI yang sempat ditemuinya.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agas mengatakan institusinya masih menunggu langkah DPR mengenai keputusan melanjutkan Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada.

"Prinsipnya, pemerintah sifatnya pasif dan menunggu keputusan dari parlemen, apakah revisi UU (Pilkada)

## Iklan Mini

Cara Mudah, Atraktif dan Interaktif

Membaca Koran Digital di Era Milenial

- 1. Mudah
- 2. Atraktif
- 3. Interaktif
- 4. Praktis
- 5. Efisien
- 6. Modern
- 7. Inovatif
- 8. Kreatif
- 9. Berdaya guna
- 10. Berkeadilan

Langkah-langkah mengunduh dan menggunakan aplikasi Pikiran Rakyat

DOWNLOAD THIS APP

"GRATIS"

Berita dan informasi terbaru langsung ke genggaman tangan Anda

Untuk Pemakaian Iklan Harian: 022-420 4330 / 0895 3019 3337

### Tok KPI Tetapan DPR Pilkada di Kota Bandung

DPR RI merupakan hasil dari kerja Pergerakan Politik Demokrasi (Pilkada) di Kota Bandung. Pada pemilihan umum di Kota Bandung, Pilkada dilaksanakan pada 2024 ini terdapat 3.570 TPS. Jumlah ini turun dari saat Pilkada 2024 yang mencapai 7.424 TPS.

Wenti Prihadianiti

Ketua KPI Kota Bandung

Klik Beritanya di [www.prfmnews.id](http://www.prfmnews.id) dan [Hanya di Radio 107.5 PRFM](http://Hanya di Radio 107.5 PRFM)

IKUTI PERKEMBANGAN BERITA TERBARU

PRFM Via Aplikasi Tik Tok

@prfmnews Follow Tik Tok